Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Oleh : Ramayana

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing II : Elmayanti S.H., MH

Alamat : Jln. Kembang Selasih No. 14 Pekanbaru

Email / Telepon : ramyanasimanjuntak02@gmail.com / 0823-9115-8114

ABSTRACT

Children are vulnerable to becoming victims in a crime. One of the crimes against children is the exploitation of children who are made beggars, where children are employed by begging on the streets. In the child protection law, it is clear that there are prohibitions and criminal sanctions against perpetrators who exploit children, but there are still many cases of exploitation of children not followed up by law enforcers. Law enforcers should take firm action against child exploiters who become beggars based on Law Number 35 of 2014 concerning Protection. The author's research objectives are: To find out the law enforcement against the offenders of child exploitation crimes that are used as beggars, and the factors that hinder the law enforcement of the perpetrators of child exploitation crimes that are used as beggars in the Kepolresta Pekanbaru legal area.

In this study the authors use the method of sociological legal research that is research that wants to see the correlation between law and society, this study was conducted in the jurisdiction of the Pekanbaru police resort town, while the population and sample are all of the parties related to the problem under study, in this study the data source used are primary data sources, secondary data, and Tertiary Legal Materials, data collection techniques in this paper that is by conducting interviews and library research, and the authors analyze the data using deductive methods namely ways of thinking that draw conclusions from a statement or proposition that is general nature into a statement that is special.

From the results of the author's research, it can be concluded that; first, law enforcement against child exploitation perpetrators who are beggars in the Pekanbaru city police jurisdiction is less effective because the perpetrators of child exploitation criminals who are used as beggars never process law. Second, the servant factors faced by the police in upholding the law are the lack of awareness and awareness of the law of the community, factors of law enforcement officials, facilities and infrastructure, culture and morals of the community

Keywords: Law Enforcement - Criminal Acts - Child Exploitation

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), maka kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) Bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Hukum dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah larangan. Kalau orang memiliki suatu pengertian hukum yang tepat, mereka akan menaruh rasa hormat terhadap hukum dan akan timbul semangat untuk membangun suatu sistem hukum yang lebih sempurna dan efektif.¹ Hidup dan berkembangnya hukum dalam ruh kehidupan masyarakat memberikan jawaban dan kepastian akan perlindungan hak dan kewajiban setiap orang individu, kelompok, dan Negara.²

Setiap manusia di samping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya mempunyai suatu hubungan erat ataupun memiliki keterkaitan dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan bermasyarakat ada kalanya terjadi suatu benturan kepentingan satu dengan lainnya dan juga terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang dikenal dengan sebutan kejahatan. Kejahatan merupakan masalah sosial yaitu masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat

dimana pelaku dan korban adalah anggota masyarakat itu sendiri.³

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak.⁴ Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.⁵

Contoh kasus yang penulis teliti di kota pekanbaru yaitu kasus eksploitasi anak yang dengan modus menjadi pengemis jalanan yang dilakukan ibu kandung yang berinisial EO (37), dan keempat anak kandung EO itu adalah CA (15), NA (10), SAS (8), dan IR (6). Terungkapnya dugaan eksploitasi anak itu berawal dari laporan guru Sekolah Dasar (SD) tempat dua dari anak EO belajar, yang dimana guru tersebut sering melihat anak tersebut tidur saat belajar, dan guru tersebut memeriksa kedua siswa itu dan pengakuan siswa itu cukup mengejutkan, yang dimana mereka dipaksa oleh orang tuanya memintaminta sepulang sekolah di persimpangan lampu merah.⁶

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Eksploitasi anak yang Dijadikan

³ Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*”, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 40.

⁴ Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, *Op.cit*, hal 13

⁵ Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 64

⁶ www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2016/04/01/polisi-dalami-dugaan-eksploitas-i-anak-jadi-pengemis, diakses tanggal 23 agustus 2019

¹ Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif:Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No 1 Agustus 2010, hlm 115.

² Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi “*Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*”, Taman Karya, Pekanbaru, 2018, hlm 11

Pengemis di wilayah hukum kepolisian resor kota Pekanbaru?

2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Eksploitasi Anak yang dijadikan Pengemis di wilayah hukum Kepolresta Pekanbaru?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan penulis capai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak yang dijadikan pengemis di wilayah hukum kepolresta Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Eksploitasi Anak yang dijadikan Pengemis di wilayah hukum Kepolresta Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian antara lain :

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa Universitas Riau yang ingin melakukan penelitian selanjutnya terkait masalah yang penulis teliti.
- c. Penelitian ini untuk memberikan sumbangan pikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak yang dijadikan pengemis di wilayah hukum Kepolresta Pekanbaru.

C. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal itu

hanya dijamin dengan hukum yang baik.⁷ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁸ Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen *eksekutif* dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegak hukum.⁹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam arti hukum, tanggung jawab tak dapat dilepaskan dari manusia sebagai subjek hukum, karena dengan perannya sebagai subjek hukumlah, manusia memiliki hak dan kewajiban, dan itu pula artinya tanggung jawab tak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban. Roscoe Pond mengemukakan bahwa pertanggungjawaban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam bentuk

⁷ RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hlm 5

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 160

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung*, 2006, hlm 191

penyerangan maupun dalam bentuk persetujuan.¹⁰

Menurut

Prodjomahamidjodjo, seorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal (1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum (unsur objektif), dan (2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (unsur subjektif).¹¹

D. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹²
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³
3. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupaperbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm 110

¹¹ Prodjomahamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 31.

¹² Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Bearu, Bandung, 1983, hml 84

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 98

keuntunganbaik materiil maupun immateriil.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau sosiologis yuridis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu dilakukan di wilayah hukum kepolisian resort kota pekanbaru. Adapun alasan penulis tertarik mengambil lokasih tersebut di karenakan masih banyak anak yang dijadikan pengemis di wilayah hukum kepolisian resort kota pekanbaru, dan penegakan hukum terhadap pelakunya kurang berjalan dengan efektif sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang mengeksploitasi anak dijadikan pengemis.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti. Oleh karna populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil

¹⁴ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesianomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁵ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 2014 hlm 52.

sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.

4. Sumber Data

Berdasarkan penelitian hukum sosiologis, maka alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

Data Premier adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku- buku literatur,

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan langsung terhadap objek penelitian. Penulis lakukan di sekitar kota pekanbaru.

b. Wawancara ditujukan langsung kepada Pegawai bagian anak di dinas sosial kota pekanbaru dan Kanit PPA polresta Pekanbaru sebagai data pendukung untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data akan diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian lagis dan sistematis yang dihubungkan dengan berbagai peraturan yang berlaku.¹⁶ Dalam menarik kesimpulan penulis berpikir menggunakan metode deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

¹⁶ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Pers, Jakarta, 2008, hlm 219

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah bahasa beelanda yaitu *strafbaarfelt*.¹⁷ Istilah delik atau *strafbaarfelt* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, dan pelanggaran pidana.¹⁸

Hukum pidana belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, terkadang juga *delictum* yang berasal dari bahasa latin *delictum* untuk istilah tindak pidana. Hukum pidana negara-negara anglo-saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaarfeit*.¹⁹

Dasar yang menjadi pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana yaitu Asas legalitas tercantum di dalam pasal 1 KUHP yaitu "*Nullum delictum nulla poena sine praevia poenali*" yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 1 KUHP ini

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Grafindo Persad, Jakarta, 2002, hlm 67

¹⁸ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapann ya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 204

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 86

menunjukkan hubungan erat antara pidana dan undang-undang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari berbagai pengertian tindak pidana yang diberikan oleh para ahli hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁰

- a) Perbuatan (manusia);
- b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.²¹

Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan kaidah-kaidah, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

3. Tujuan Hukum Pidana

Secara konkrit tujuan hukum pidana terbagi menjadi dua, ialah sebagai berikut:

- 1) Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
- 2) Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima

kembali dalam kehidupan lingkungannya.²²

Andi Hamzah juga menerangkan mengenai tujuan pidana, yang mengatakan bahwa dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tujuan itu adalah:

- a. *Reformasi* berarti memperbaiki atau merehabilitasi pejabat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat;
- b. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman;
- c. *Restribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat beradab;
- d. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi pejabat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian tentang anak

Untuk menentukan tentang siapakah yang disebut anak atau orang belum dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan.²⁴ Berbagai pendapat para ahli mengemukakan tentang pengertian anak atau orang yang belum dewasa, yaitu menurut

²⁰ *Ibid*

²¹ P.A.F.Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 193

²² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, raja grafindo persada, Jakarta, 2007, hlm 173

²³ Andi hamzah, *Op.cit*, hlm 28

²⁴ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm 35

W.J.S.Poerwodarminto anak adalah manusia yang masih kecil.

R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.²⁵

Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan.

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²⁶ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷

2. Hak dan Kewajiban Anak

Anak memiliki hak dan kewajiban yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Anak

1. Pengertian eksploitasi Anak

Eksploitasi berasal dari bahasa inggris yaitu exploitation yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap suatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.²⁸

Ada aturan hukum yang secara tertulis mendefinisikan arti kata "eksploitasi" yaitu dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

2. Jenis- Jenis Eksploitasi Anak

Ditinjau dari segi bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman risiko yang dihadapi anak, terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dapat dimasukkan dalam keadaan yang dikualifikasikan sebagai eksploitasi anak berbahaya dan eksploitasi anak yang paling tidak bisa ditolerir lagi.

²⁵ *Ibid*, hlm 36

²⁶ M. Nasir Djamil, "Anak Bukan Untuk Dihukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 8

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²⁸ <https://www.almaany.com>, diakses tanggal 4 september 2019

3. Dampak Eksploitasi Anak

Berikut ini dampak yang timbul terhadap anak yang tereksploitasi;²⁹

- a. Gaya hidup dan perilaku anak jalanan yang acap kali membahayakan dan mengancam keselamatan dirinya sendiri, seperti perilaku ngelem, seks bebas, kebiasaan berkelahi, dan sebagainya.
- b. Ancaman gangguan kesehatan berkaian dengan kondisi lingkungan dan jam kerja yang acap kali kelewatan batas bagi anak-anak yang masih berusia belia.

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian perlindungan anak

Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.³⁰

B. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi. Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat dimasa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajahan dan berbagai operasi

²⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, kencana, Jakarta, 2010, hlm 217

³⁰ <https://www.wisatapekanbaru.com/sejarah-kota-pekanbaru>, Di akses Tanggal 6 agustus 2019

militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain.

Dalam perkembangan dalam paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurus keamanan dan ketertiban didalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun internasional, sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Polri juga mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seseorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).³¹

C. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang dulunya merupakan instansi vertikal yang disebut dengan pegawai pusat yang diperbantukan didaerah dimana sejarah instansi ini terbentuk pada tahun 1974. Pada waktu itu belanda masih ingin kembali menjajah Negara Republik Indonesia, terjadilah peperangan antara belanda dengan TNI, banyak rakyat yang mengungsi dan terjadi kekacauan disana-sini. Untuk membentuk ABRI maka diperlukan suatu lembaga atau instansi-instansi maka berdirilah lembaga yang disebut inspek sosial mulai dari pusat sampai kedaerah. Pada tahun 1950 inspeksi sosial

ditukak dengan jawatan social yang tugas pokoknya di sesuaikan dengan UUD1945 pasal 34, yaitu fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh Negara. Pada tahun 1974 jawatan Sosial diganti dengan Departemen Sosial RI, untuk tingkat pusat dan tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah Departemen Sosial dan tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Departemen Sosial Kabupaten/Kota.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Visi Dinas sosial dan Pemakaman Kota pekanbaru adalah sebagaiberikut “Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan peran Masyarakat serta Pemakaman yang bersih, tertib dan indah”.

Dari visi diatas dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS.
- b. Mengembangkan system jaminan sosial bagi PMKS secara berkelanjutan.
- c. Pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.
- d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Mewujudkan pemakaman yang bersih, tertib dan indah.

³¹ <http://www.polri.go.id/index.com>, diakses tanggal 7 Agustus 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Penegakan Hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³²

Penegakan hukum adalah ukuran untuk suatu kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Negara-negara maju di dunia biasanya dinilai tidak sekedar perekonomiannya yang maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia berjalan dengan baik. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan di dalam masyarakat.

Dalam menegakkan ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).³³ Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Kejahatan tidak akan pernah lepas dari kehidupan masyarakat. karena dimana ada masyarakat disitu pula adanya suatu kejahatan. kejahatan selain berhubungan dengan kemanusiaan juga berhubungan dengan ketertiban sosial masyarakat. Anak merupakan salah satu yang rentan menjadi korban kejahatan oleh orang dewasa. Kejahatan terhadap anak sudah sering terjadi di negara indonesia, salah satunya terdapat di Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu kota di Indonesia yang sedang berkembang saat ini. Semakin berkembangnya suatu kota membuat kebutuhan untuk hidup pun semakin meningkat, sehingga setiap orang akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup, sekalipun akan melakukan tindakan melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satunya dengan mengeksploitasi anak yang dijadikan pengemis.

Mengeksploitasi anak yang dijadikan pengemis merupakan salah satu tindakan yang dilarang oleh pemerintah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang terdapat di dalam Pasal 76 I yang berbunyi "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi pidana yang terdapat di dalam pasal 88 yang mengatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Walaupun aturan tersebut sudah ada, dalam melaksanakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum belum berjalan dengan semestinya. Hal tersebut tampak jelas dari masih banyaknya anak-anak yang

³² Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit*

³³ *Ibid*

berkeliruan dipersimpangan lampu merah Kota Pekanbaru untuk memintaminta maupun menjual barang asongan.

B. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Eksploitasi Anak yang dijadikan Pengemis di wilayah hukum Kepolresta Pekanbaru

Menurut Soerjono Soekanto di dalam teori penegakan hukum, Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.³⁵

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Eksploitasi anak yang dijadikan pengemis di wilayah

hukum kepolisian resor kota Pekanbaru, dilakukan dengan cara melakukan razia gabungan yang dilakukan oleh dinas sosial dan satpol PP dan didamping oleh kepolisian. Dalam menangani anak tersebut diserahkan kepada dinas sosial, tanpa ada penindak lanjutan terhadap pelaku, dan upaya yang dilakukan dalam menegakan hukum yaitu dengan upaya *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan) tetapi hal tersebut belum berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan penegakan hukum kurang efektif dikarenakan masih banyak pelaku tindak pidana eksploitasi anak yang tidak diproses secara hukum. Hal ini dikarenakan karna ada hambatan-hambatan yang dialami oleh kepolisian.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Eksploitasi Anak yang dijadikan Pengemis di wilayah hukum Kepolresta Pekanbaru adalah Kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat, Kurangnya respon kepedulian sumber daya manusia, Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak hukum terhadap Undang-Undang Perlindungan anak, Sarana dan prasarana, Budaya dan moral yang diantut masyarakat.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian hendaknya menegakan hukum dengan semestinya yang dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, yang menegaskan sanksi terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban, kepolisian seharusnya bekerja sebagaimana mestinya, agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Loc.cit*

³⁵ *Ibid*

2. Dalam menegakan hukum terhadap pelaku yang mengeksploitasi anak, polisi seharusnya menyelidiki dengan baik pelaku yang mengeksploitasi anak tersebut, dan bekerja sama oleh pihak yang berwewenang lainnya, dengan membuat pembagian tugas yang jelas sehingga penegakan hukum terhadap pelaku yang mengeksploitasi anak berjalan dengan baik dan jumlah anak yang di eksploitasi pun berkurang, agar tercapainya tujuan kesejahteraan anak dikota pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Baringbing, RE, 2001, "*Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*", Pusat Kajian Reformasi, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Grafindo Persad, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 3
- Djamali, R. Abdoel, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, raja grafindo persada, Jakarta
- Djamil, M. Nasir, 2015, "*Anak Bukan Untuk Dihukum*", Sinar Grafika, Jakarta
- Firdaus, Emilda dan Sukamarriko, Andrikasmi, 2018, "*Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*", Taman Karya, Pekanbaru
- Gultom, Maidin, 2012, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*", PT Refika Aditama, Bandung
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Husin, Kadri dan Husin, Budi Rizki, 2016, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*", Sinar Grafika, Bandar Lampung
- Ishaq, 2008, "*Dasar-Dasar Ilmu hukum*", Sinar Grafika, Jakarta
- Iskandar, 2008, "*Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan Kualitatif)*", Gaung Persada Pers, Jakarta
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1997, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Koro, Abdi, 2012, "*Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*", PT. Alumni, Bandung
- Lamintang, P.A.F, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Arief, Mansur, Dikdik dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- M. Hadjon, Pjillipus, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

- Mertokusumo, Sudikno, 2005, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 2001, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta
- Raharjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Bearu, Bandung
- _____, 2006, "Ilmu Hukum", *Pt Citra Aditya Bakti*, Bandung
- Sadli, Saparinah, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta
- Sianturi, SR, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sjahdeini, Sutan, Remy, 2011, *pertanggungjawaban pidana korporasi*, pustaka utama grafiti, jakarta
- Soekanto, Soerjono ,2012,"*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*", PT Raja Grafindo, Jakarta
- _____, 2014, "pengantar penelitian hukum", UI Press, Jakarta
- Supramono, Gatot 2000," *Hukum Acara Pengadilan Anak*", Djambatan, Jakarta
- Suyanto, Bagong , 2010, *Masalah Sosial Anak*, kencana, Jakarta
- B. Jurnal**
- Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can.J.L. and Juris, 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada 5 Mei 2019
- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edward, "Home Liability Coverage: Does Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intented", *Jurnal Wes Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, Pada Tanggal pada 5 Mei 2019
- Emilda, Firdaus, *Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu Di Provinsi Riau. Riau Law Journal*, 1(1), 46-60.
- Jhon N. Gallo,"*Effectivelaw-Enforcement Techniques For Reducing Crime*", *Journal of Criminal and Criminologi*, Vol. 88 No 4, Summer, 1988, hlm. 14, diakses pada 9 Mai 2019 pukul 08.00 WIB
- Vinay Mishra Siddarth Tatiya, "Criminal Lialibility: Lessons Learnt and to be Learnt", Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 14 April

2019 dan diterjemah oleh google translate.

Widia, Edorita, "menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif:Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No 1 Agustus 2010, hlm 115.

C. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Peraturan Pemerintah Kota Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Organsasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan, Organsasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

D. Website

<https://www.wisatapekanbaru.com/sejarah-kota-pekanbaru>, Di akses Tanggal 6 agustus 2019

<https://www.wisatapekanbaru.com/geografis-kota-pekanbaru>, Di akses Tanggal 6 agustus 2019

<http://www.polri.go.id/index.com>, diakses tanggal 7 Agustus 2019

<http://www.polrestapekanbaru.com/#>, diakses tanggal 7 Agustus 2019

<https://cimahi.jabar.polri.go.id/sat-fungsi/sat-reskrim>, di akses tanggal 7 Agustus 2019.

<http://repository.uin-suska.ac.id/6411/3/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 7 Agustus 2019

<http://pekanbaru.go.id/p/hal/visi-kota>, diakses tanggal 6 Agustus 2019

www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2016/04/01/polisi-dalami-dugaan-eksploitas-i-anak-jadi-pengemis, diakses tanggal 23 agustus 2019

<https://www.almaany.com>, diakses tanggal 4 september 2019

E. Kamus, Majalah

Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia(Cet IV;Bandung: CV. Yrama Widiya, 2007), hlm. 129

Brosur ESKA, *Anak Bukan Objek Seks. (Koalisi Nasional Penghapusan EKSA)*, Medan, 2011, hlm 2

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Cet. Kedua, hlm 313

Pramudya, Kelik, dan ananto widiatmoko, 2010, *pedoman etika profesi aparat hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta